

EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA

Revalia Putri¹

revaliaputri448@gmail.com¹

Hendra Riofita²

hendrariofita@yahoo.com²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of social assistance programs implemented by the Indonesian government in reducing poverty levels. Programs such as the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), and Direct Cash Assistance (BLT) have made significant contributions in helping poor people meet their basic needs and increasing access to education and health services. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, reviewing various literature sources from the last five years. The results of the analysis show that social assistance has a positive impact on improving community welfare and reducing poverty levels, but its implementation still faces challenges such as inaccurate targeting, weak monitoring systems, and the risk of recipient dependence on assistance. Therefore, integration between social assistance and economic empowerment programs is very necessary so that this social intervention is not only temporary, but is able to encourage sustainable economic independence.

Keywords: Social Assistance, Poverty, Effectiveness, Empowerment, Public Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah memberikan kontribusi signifikan dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji berbagai sumber literatur dari lima tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa bantuan sosial berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya sistem pengawasan, dan risiko ketergantungan penerima terhadap bantuan. Oleh karena itu, integrasi antara bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan agar intervensi sosial ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Kemiskinan, Efektivitas, Pemberdayaan, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial utama di Indonesia, yang ditandai dengan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2021). Faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi penyebab utama kemiskinan (Suharto, 2017). Untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan program bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Bantuan sosial merupakan intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa program utama yang diterapkan di Indonesia antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI). PKH bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan (Salsabila et al., 2024).

BPNT membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan melalui bantuan kartu elektronik yang digunakan di e-warong. Selain meningkatkan ketahanan pangan, program ini juga mendorong inklusi keuangan masyarakat miskin (Samputra & Ramadhani, 2019). JKN-PBI memastikan masyarakat miskin memiliki akses layanan kesehatan tanpa membayar langsung di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Dengan adanya program ini, diharapkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat lebih terjangkau. Berbagai penelitian

menunjukkan bahwa bantuan sosial berperan dalam mengurangi kemiskinan.

Studi Bappenas (2016) menyebutkan bahwa PKH telah membantu sekitar 400.000 keluarga miskin menjadi lebih mandiri hingga tahun 2015. Data BPS tahun 2016 juga menunjukkan bahwa rasio gini—indikator ketimpangan ekonomi—menurun dari 0,41 menjadi 0,40, mengindikasikan kontribusi bantuan sosial dalam mengurangi kesenjangan ekonomi (Bappenas, 2016). Namun, implementasi bantuan sosial masih menghadapi tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Banyak individu yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan terabaikan (Suharto, 2017). Kesalahan dalam pendataan sosial menjadi faktor utama dalam distribusi yang kurang optimal. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan sosial juga menjadi masalah, di mana sebagian penerima manfaat cenderung mengandalkan bantuan daripada berusaha meningkatkan kemandirian ekonomi mereka (Syata, 2024). Kurangnya transparansi dalam distribusi bantuan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan dan korupsi dalam penyaluran bantuan, yang mengurangi efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan (Salsabila et al., 2024). Oleh karena itu, pengawasan ketat serta pemanfaatan teknologi dalam pendistribusian bantuan sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan struktural yang telah lama dihadapi oleh Indonesia dan menjadi tantangan utama dalam upaya pembangunan nasional. Untuk mengatasi masalah ini,

pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Prakerja. Program-program tersebut bertujuan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta meningkatkan daya beli dan kualitas hidup mereka. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penerima bantuan dan meningkatnya anggaran negara yang dialokasikan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program ini. Evaluasi tersebut tidak hanya berguna untuk menilai sejauh mana tujuan awal program telah tercapai, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan, kekurangan, serta potensi perbaikan agar dampaknya lebih optimal.

Efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya diukur dari penyaluran dana yang tepat sasaran, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait pelaksanaan program di berbagai daerah, partisipasi masyarakat, kualitas data penerima, serta pengaruh bantuan terhadap perilaku ekonomi rumah tangga miskin. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi meliputi ketepatan targeting, ketergantungan terhadap bantuan, hingga risiko penyalahgunaan dana. Melalui evaluasi yang sistematis dan berbasis data, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Dengan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program bantuan sosial telah berkontribusi dalam menurunkan angka

kemiskinan di Indonesia. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna meningkatkan efektivitas program sosial ke depan serta memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Program Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial adalah serangkaian kebijakan atau kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan kurang mampu. Bantuan sosial (bansos) ini dapat berupa bantuan tunai maupun non-tunai yang diberikan secara langsung kepada individu atau rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban ekonomi, mencegah penurunan kesejahteraan yang lebih parah, dan membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

Bantuan sosial juga merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Presiden terkait masing-masing program. Dalam pelaksanaannya, bansos mencakup program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program bantuan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan adanya bantuan sosial, diharapkan penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan dalam jangka panjang, melainkan mampu keluar

dari garis kemiskinan dan hidup mandiri. Oleh karena itu, program ini bukan hanya soal pemberian bantuan materi, tetapi juga berkaitan dengan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tanggamenjalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. upaya penanggulangan kemiskinan tidak perlu terjebak pada faktor-faktor penyebab saja yang bisa jadi bersifat khusus atau kasus tertentu, namun didasarkan pada pemberdayaan dan pengembangan potensi sumberdaya yang tersedia. (Sa'diyah El Adawiyah, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai jurnal dan skripsi terpercaya yang relevan, yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitasnya, dengan mempertimbangkan aspek keandalan, relevansi, dan kontribusi terhadap kajian terkait program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Data yang dikumpulkan mencakup hasil penelitian

terdahulu yang mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial, tantangan dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, serta perbedaan dalam hasil penelitian yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif guna menggambarkan secara komprehensif peran bantuan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Program bantuan sosial di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI), telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga dalam memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial telah membantu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas program ini masih menjadi perdebatan karena berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Ketepatan sasaran, transparansi dalam penyaluran, serta keberlanjutan manfaat bagi penerima menjadi aspek penting yang perlu terus dievaluasi. Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran, di mana masih banyak individu yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara

masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan. Kesalahan dalam pendataan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan distribusi bantuan tidak berjalan optimal. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan sosial juga menjadi tantangan besar, di mana sebagian penerima manfaat cenderung mengandalkan bantuan daripada berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Ditambah lagi, kurangnya transparansi dalam distribusi bantuan sering kali menimbulkan penyalahgunaan, seperti praktik korupsi yang menyebabkan bantuan tidak sampai kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga turut menghambat efektivitas program ini, terutama di daerah terpencil yang memiliki infrastruktur terbatas.

Bagian Bantuan Sosial merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum pada pasal 1 ayat 1 bahwa Bantuan Sosial merupakan “bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial”. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan subsidi kebutuhan dasar telah terbukti berhasil dalam meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, memfasilitasi akses kebutuhan pokok, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi dan bantuan sosial sangat terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi yang kurang

mampu (Br Sembiring, F. F., & Nababan, R. 2024).

Bantuan sosial yang tepat sasaran dapat membantu rumah tangga miskin (kurang mampu) menjalani kehidupan yang lebih baik dan memberikan mereka akses ke sumber daya untuk kesehatan dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Bantuan langsung tunai langsung dapat secara signifikan mempengaruhi keuangan rumah tangga yaitu bagi keluarga yang berpenghasilan rendah terutama selama masa guncangan ekonomi seperti pandemi yang terjadi di Indonesia. Ketidakmampuan rumah tangga/keluargaberpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan mereka sering kali membuat peningkatan daya beli menjadi signifikan. Hal itu sesuai dengan pernyataan Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021), mengungkapkan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu peningkatan daya beli, yang mengurangi beban untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan pokok, obat-obatan, dan pembayaranutang di warung. Dengan adanya program bantuan sosial seperti memberikan uang tunai seperti BLT dan PKH mampu meningkatkan daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keluarga yang diklasifikasikan sebagai keluarga miskin atau kurang mampu, serta masyarakat yang membutuhkan, sangat membantu keberlangsungan kehidupan sehari-hari mereka dengan adanya program bantuan sosial (Supit, B. F., & Lumingkewas, E. 2023).

Peningkatan aksesibilitaskesehatan dan pendidikan dalam program bantuan sosial sangat penting. Program bantuan sosial seperti PKH akan mendorong keluarga

untuk menjaga anak-anak mereka untuk terdaftar di sekolah dan mendapatkan medis. Anak-anak dirumah tangga penerima manfaat memiliki peluang yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan keuangan mereka di masa depan ketika siklus kemiskinan antar generasi diputus melalui peningkatan akses kesehatan dan pendidikan. PKH meningkatkan sumber daya manusia, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, dengan menawarkan dukungan sosial bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah dan rentan (Vidya Rachma Pracelia, Djoko Widodo, & Radjikan, R. 2024). Hal itu senada juga diungkapkan oleh Mandolang, Y., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2019) bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan efek jangka pendek yaitu mengurangi beban pengeluaran bagi penerima manfaat sedangkan efek jangka panjang yaitu dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tantangan dalam Implementasi dan Penargetan program bantuan sosial : Distribusi yang salah arah, yang disebabkan oleh data yang keliru atau pengalihan bantuan sering kali menjadi penghalang bagi efektivitas bantuan sosial. Untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke rumah tangga yang paling membutuhkan, sistem data yang kuat dan transparan sangat penting. Salah satu masalah dengan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bone Bolango adalah kelengkapan informasi dan data pribadi penerima bantuan sosial yang kurang/belum di perbaharui (Rauf, D. N. 2023). Masalah yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak terkait penyaluran bantuan sosial yaitu kurangnya kesadaran masyarakat penerima manfaat tentang nilai bekerja dan berusaha

sendiri karena adanya keyakinan bahwa bantuan sosial cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemberian Bantuan sosial dimaksudkan agar masyarakat yang berpenghasilan rendah/atau kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masyarakat harus bijak dalam memanfaatkan bantuan sosial seperti menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lebih utama/primer dan tidak menggunakan bantuan dalam membeli barang-barang mewah. Sasaran penyaluran dana bantuan sosial bukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau mewah seperti membeli smartphone, kosmetik, dan sebagainya (Maulida Fitri, Aditya Agung Nugraha, & M. Taufiq Abadi. 2022).

Oleh karena itu, bantuan sosial tepat sasaran atau berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan berdampak positif terhadap keluarga penerima sehingga bantuan tersebut dapat digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Perlindungan sosial dan pengurangan beban pada keluarga adalah dua manfaat dari efek positif program bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, kekurangan dari program ini termasuk mendorong gaya hidup malas dan rentan terhadap perselisihan. Program bantuan sosial harus dibuat untuk mendorong peningkatan keterampilan dan prospek kerja penerima agar dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Bantuan sosial jangka panjang yang hanya menangani kebutuhan dasar tanpa mempertimbangkan pemberdayaan biasanya tidak efektif. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan adalah penggabungan bantuan

sosial dengan program-program yang mendorong pembangunan ekonomi.

Program bantuan sosial di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal cakupan dan bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi beberapa program utama, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat disimpulkan bahwa program-program ini memiliki dampak positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, meskipun dalam skala yang masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tren penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, yang sebagian dipengaruhi oleh intervensi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan terstruktur.

Namun demikian, efektivitas program bantuan sosial masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah masalah ketepatan sasaran. Meskipun pemerintah telah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan, masih ditemukan kasus inclusion error (orang yang tidak layak tetapi menerima bantuan) dan exclusion error (orang yang layak tetapi tidak menerima bantuan). Selain itu, keterlambatan distribusi bantuan, tumpang tindih program antarinstansi, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program yang ideal. Faktor-faktor tersebut mengurangi potensi bantuan sosial untuk benar-benar menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat miskin.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan penerima manfaat, terlihat

bahwa bantuan sosial umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, seperti makanan, kebutuhan anak sekolah, dan layanan kesehatan. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mampu memanfaatkan bantuan untuk kegiatan produktif yang berkelanjutan, seperti modal usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan frekuensi bantuan, tetapi juga oleh pendampingan, edukasi keuangan, dan kebijakan pelengkap lainnya yang mendorong pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, agar program bantuan sosial benar-benar efektif dalam mengurangi kemiskinan secara jangka panjang, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas data penerima, memperkuat sistem pengawasan, serta mengintegrasikan program bantuan dengan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Hanya dengan cara itu, bantuan sosial tidak sekadar menjadi solusi sementara, tetapi menjadi instrumen transformatif dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program bantuan sosial yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka kemiskinan. Program-program tersebut membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Keberhasilan ini didukung oleh data dari BPS dan evaluasi kebijakan oleh

Bappenas, yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan dan rasio ketimpangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, efektivitas program bantuan sosial ini belum maksimal karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Masalah utama yang sering terjadi adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan (inclusion dan exclusion error), lemahnya sistem pengawasan, serta masih adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan bantuan. Selain itu, penerima bantuan yang tidak dibekali dengan program pemberdayaan berisiko mengalami ketergantungan terhadap bantuan jangka panjang, sehingga tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun bantuan sosial memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem distribusi, pendataan yang akurat, serta pendekatan pemberdayaan ekonomi.

Saran

1. Peningkatan Akurasi Data Penerima
Pemerintah perlu memperbarui dan memperbaiki sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar bantuan dapat benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Penggunaan teknologi digital berbasis NIK dapat meminimalisir kesalahan data.
2. Integrasi dengan Program Pemberdayaan
Bantuan sosial harus diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini

penting agar penerima tidak bergantung terus-menerus pada bantuan, tetapi memiliki kemandirian ekonomi.

3. Peningkatan Transparansi dan Pengawasan

Pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial harus diperketat melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas, LSM, dan masyarakat. Transparansi data penerima dan realisasi bantuan harus dipublikasikan secara terbuka.

4. Edukasi Keuangan bagi Penerima Manfaat

Edukasi keuangan sangat penting agar bantuan yang diterima dapat digunakan secara bijak untuk kebutuhan primer dan bukan konsumsi barang sekunder atau mewah.

5. Peningkatan Koordinasi Antarlembaga
Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih dan tepat waktu, terutama di daerah terpencil yang infrastrukturnya masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. F. (2022). Dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Anwar, A. (2024). Efektivitas bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Sosial dan Ekonomi*, 12(1), 21-35.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). *Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia*.

- Br Sembiring, F. F., & Nababan, R. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6779–6790.
- Kementerian PPN/Bappenas. Badan Pusat Statistik. (2021). Pemetaan kemiskinan di Indonesia. BPS
- Maulida Fitri, Aditya Agung Nugraha, & M. Taufiq Abadi. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) di Pesurungan Kota Tegal. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 184–188
- Hendra Riofita. Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 13 Number 2, 2024*: 137–151
- Riofita, H., & Iqbal, M. (2022). Enhancing Islamic higher education image as the halal industry driving Indonesian halal industries. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 4(1), 77-90
- Riofita, H. (2023). Memicu kesediaan mahasiswa untuk merekomendasikan jurusan pendidikan ekonomi. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(1), 43-57.
- Riofita Hendra, (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, vol 2, no 1.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13
- Sa'diyah El Adawiyah. Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*. Volume 1 Nomor 1, April 2020
- Suharto, E. (2017). Pembangunan sosial dan kebijakan sosial di Indonesia. Alfabeta.
- Suharto, E. (2024). Implementasi bantuan sosial dalam pengurangan kemiskinan di Desa Banjarnendo. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 10(2), 45-60
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1059–1068.